

DAFTAR RUJUKAN

BUKU:

- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Amriani Nurmaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persda, 2012
- Arba Haji, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Atmadja Gede I Dewa, Budiarta Putu I Nyoman, *Teori – teori Hukum*. Setara Press, 2018
- Bernhard Limbong. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margareta Pustaka, 2012
- Djulaeka, Rahayu Sari, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2019
- Faudy Munir, *Teori – teori besar dalam hukum (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Gunawan Heryono Deddi, *Perubahan Sosial di Pedesaan Bali: Dualitas, Kebangkitan Adat, dan Demokrasi*. Tanggerang Selatan: Tari Jagat Bali, 2014
- Hasyim Farida, *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hutagalung Arie Sukami, *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Depok: Raih Asa Sukses (Penerbit Swadaya Group), 2012

Hutagalung Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017

Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Rahmadi Takdir. *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Rajawali Pers, 2011

Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016

Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Santoso Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta Timur: Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group), 2019

Santoso Urip, *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Santoso Urip, *Hukum Agraria Kajian Koprehensif*. Kencana (Divisi Dari Prenadamedia Group), 2017

Sembiring Jimmy Joses, *Pandangan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visi Median, 2010

Simanjuntak P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Syarief Elsa, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2012

Windari Artha Ratna, *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

Windari Artha Ratna, *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Lembaran Negara 1960 – 104

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986 Tentang

Pembentukan Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau, Dan

Penyeberangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 9

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang
Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas
Tanah

Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 61.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan
Pertanahan Nasional

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus
Pertanahan

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Dan Kantor Pertanahan

Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009
Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 445

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali

Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan

JURNAL:

Hasim Purba, *“Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan”* Jurnal Law Review, V. X No 2. UPH, 2010. Hal 167.

Mangatas Sihotang, Tan Kamello, Muba Simanihuruk, *“Kajian Mediasi sebagai Kebijakan Hukum dalam menyelesaikan Konflik perkara Perdata di Pengadilan Negeri/Niaga dan HAM kelas 1A Medan”* Jurnal Studi pembangunan USU Volume 1 Nomor 2, April 2006. Hlm 32.

Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryani, *“Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan”* Jurnal Dinamika Sosbud, V. 13, 1 Juni 2011. Hlm 49.

Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal yuridis, vol. 4, No 2, Desember 2017, Hlm. 150.

Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, No 2, Juli 2012, Hlm, 217-218

Munyati Sullam, *Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Negara Menjadi Hak Milik Akibat Peralihan Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat*, Lex Jurnalica, Volume 8, No 2, April 2011, Hlm 123-124

Harris Y. P. Sibuea, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*, Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, Hlm 130-131

Ria Ayu Novita, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa*

Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Diponegoro Law Journal:

Vol. 6, No 2, Tahun 2017, Hlm 4

Trisnani, *Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk*

Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar, Jurnal

Komunikasi: Vol. 6, No 1, Appril 2017, Hlm 32

Florentinus Christian Imanuel, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa*

Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara,

eJournal Ilmu Pemerintahan: Vol. 3, No 2, Tahun 2015, Hlm 1185

Layyin Mahfiana, *Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanahdi Kabupaten Ponorogo,*

Kodifikasia: Vol. 7, No. 1, Tahun 2013, Hlm 96

Iswantoro, *Dilematika Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya dalam Perspektif*

Hukum Positif, Supremasi Hukum: Vol. 2, No. 1, Juni 2013, Hlm 59

Kurniati, fakhriah, *Bpn Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di*

Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016, Sosiohumaniora, Volume 19

No. 2 Juli 2017, Hlm 99

DISERTASI:

Sholih Mua'di, *“Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan melalui cara*

Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)” Semarang :

Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008. Hlm 1.

SKRIPSI:

I Nyoman Angga Saputra Tusan, *“Efektivitas Keputusan Menteri Agraria dan Tata*

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017

Terkait Kepemilikan Tanah Desa Pakraman Temukus (Studi Kasus Di Kantor

Pertanahan Kabupten Buleleng)”, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial,
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja :2019. Hlm 46-51.

Rayi Ady Wibowo, *“Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Karanganyar
Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar”*,
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta :2010. Hlm 13.

INTERNET:

Tribun-Bali.com, 2019. ASDP Padang Bai Kembali Sodorkan Proyek Dermaga III,
dari <https://bali.tribunnews.com/2019/10/24/asdp-padang-bai-kembali-sodorkan-proyek-dermaga-iii>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2020.

NusaBali.com, 2019. Desa Adat Padangbai Sertifikatkan Lahan Pelabuhan dari
<https://www.nusabali.com/berita/64522/desa-adat-padangbai-sertifikatkan-lahan-pelabuhan>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2020.

Tribunnewswiki.Com. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dari
<https://www.tribunnewswiki.com/2020/02/11/pt-asdp-indonesia-ferry-persero>,
diakses pada tanggal 9 Oktober 2020.

KajianPustaka.com. Struktur Organisasi (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Faktor
yang mempengaruhi) dari [https://www.google.com/search?client=firefox-b
&q=struktur+organisasi+adalah](https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=struktur+organisasi+adalah), diakses pada tanggal 20 November 2020.

Wikipedia. ASDP Indonesia Ferry dari
https://id.wikipedia.org/wiki/ASDP_Indonesia_Ferry, diakses pada tanggal 21
November 2020.

Mantri klasir. Sejarah Klasiran (Pendaftaran Tanah) di Indonesia dari <http://mantri-klasir.blogspot.com/2012/12/sejarah-klasiran-pendaftaran-tanah-di.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2020.

Lampung Reforma Agraria. Penyebab Timbulnya Sengketa Pertanahan dari <http://lampungreformaagraria.blogspot.com/2016/03/penyebab-timbulnya-sengketa-tanah.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2020.

Pengertian Menurut Para Ahli. Pengertian Solusi dari <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-solusi/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020.

Ijoellawoffice. Tipologi Kasus Pertanahan dari <https://ijoellawoffice.wordpress.com/2015/06/24/tipologi-kasus-pertanahan/> diakses pada tanggal 17 Januari 2021.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Komisi II dan Kementerian ATR BPN Bentuk Tim Kerja Penyelesaian Sengketa Tanah dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29351/t/Komisi+II+dan+Kementerian+ATR+BPN+Bentuk+Tim+Kerja+Penyelesaian+Sengketa+Tanah> diakses pada tanggal 17 Januari 2021.

SUMBER LAINNYA:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)